

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami telah dapat menyelesaikan tugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai upaya untuk menindak lanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dalam rangka mewujudkan *good governance* yang merupakan tugas dan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah (PD) untuk mewujudkan aspirasi masyarakat demi tercapainya cita-cita bangsa dan negara. Pelaksanaan Laporan Kinerja ini terkait dengan diperlukannya pengembangan serta penerapan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan misi kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan diharapkan berdaya guna, berhasil guna, tepat guna, dan tepat sasaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan tertulis pertanggungjawaban formal Perangkat Daerah (PD) kepada atasannya yang memberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab setelah Perangkat Daerah mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisi gambaran tingkat pencapaian sasaran strategis atau tujuan Perangkat Daerah sebagai implementasi dari visi, misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami seluruh staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak terkait atas semua koordinasi dan bantuannya sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar sesuai harapan kita semua.

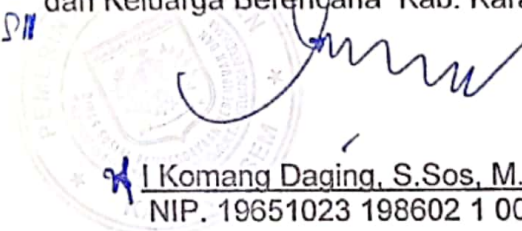
Kami juga menyadari bahwa dengan diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada OPD kami belum memadai. Dengan demikian koreksi, saran, dan masukan-masukannya sangat kami perlukan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa mendatang.

Demikian semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 5 Pebruari 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kab. Karangasem

SH



I Komang Daging, S.Sos, M.Si
NIP. 19651023 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Gambaran Umum.....	1
1.3 Sistematika Laporan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah	9
2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabuapten Karangasem	14
2.3 Perjanjian Kinerja 2023	15
BAB III CAPAIAN KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Realisasi Anggaran	42
3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2023	51
3.4 Capaian Kinerja PD Terhadap Capaian PK Bupati	52
BAB IV PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan Taktis Strategis, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama satu tahun anggaran.

1.2. GAMBARAN UMUM

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan daerah di Bidang Kesejahteraan

Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sehingga mampu mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Karangasem sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Karangasem Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru Yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi” dan misi ke-3 yaitu “Mengembangkan Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya Secara Konfrehensif dan Terintegrasi”.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);

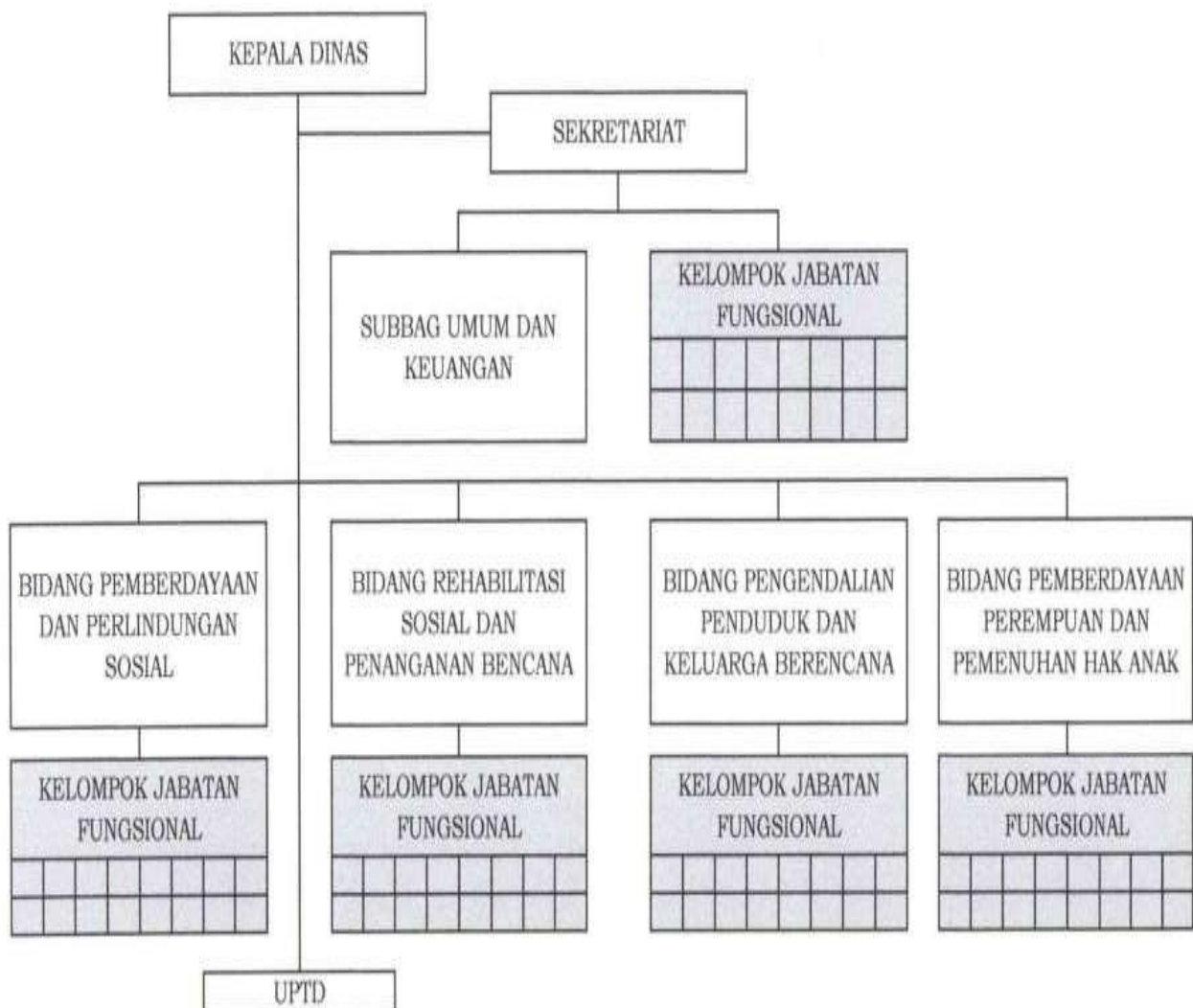
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

B. Kelembagaan

Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, termasuk yang tercantum didalamnya nomenklatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, adapun struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem seperti gambar dibawah ini:

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH

I. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, TIPE A



Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 diatasmaka dapat dijelaskan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Subagian Umum dan Keuangan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Perencana
 - c. Jabatan Fungsional Lainnya
3. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Pekerja Sosial
 - Penyuluh Sosial
 - b. Jabatan Fungsional Lainnya
4. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Penyuluh Sosial
 - b. Jabatan Fungsional Lainnya
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - b. Jabatan Fungsional Lainnya
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Penyuluh Sosial
 - b. Jabatan Fungsional Lainnya
7. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
 - a. Kepala UPTD
 - Subaggian Tata Usaha
 - Kelompok Jabatan Fungsional

c. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 37 Orang dan Pegawai Non ASN 72 Orang.

1. Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut berdasarkan Pangkat:

No.	Pangkat	Gol.	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2	Pembina Tk. I	IV/b	1 orang
3	Pembina	IV/a	7 orang
4	Penata Tk. I	III/d	8 orang
5	Penata	III/c	1 orang
6	Penata Muda Tk. I	III/b	3 orang
7	Penata Muda	III/a	4 orang
8	Pengatur Tk. I	II/d	1 orang
9	Pengatur	II/c	4 orang
10	Pengatur Muda Tk. I	II/b	3 orang
11	Pengatur Muda	II/a	3 orang
12	Juru Muda Tk. I	I/b	1 orang
Jumlah			37 orang

2. Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem berdasarkan Pendidikan:

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-2	9
2	S-1	12
3	D-III	2
4	SMA	7
5	SMP	6
6	SD	1
Jumlah		37

3. Data Tenaga Non ASN) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem berdasarkan penugasan:

No.	Penugasan	Jumlah
1	Tenaga Administrasi/Teknis	57 orang
2	Tenaga Sopir	7 orang
3	Tenaga Keamanan	4 orang
4	Tenaga Kebersihan	4 orang
Jumlah		72 orang

Sumber Data : Laporan Data Pegawai DisosP3AP2KB Semester II Tahun 2023

1.2 SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, Gambaran Umum, Tujuan dan Fungsi, Struktur Organisasi, SDMPD dan Sistematika Laporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi tentang Perencanaan Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang Capaian Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem dan Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan tentang Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Rencana Kinerja berdasarkan program kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem disusun dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem 2023.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai langkah awal pembangunan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem yang tersusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, merupakan suatu proses dari rangkaian usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis, hal yang diperhatikan adalah lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sehingga mampu mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Karangasem sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Karangasem Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru Yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi” dan misi ke-3 yaitu “Mengembangkan Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya Secara Konfrehensif dan Terintegrasi”.

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terikat dengan kinerja dan peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin di wujudkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, maka perlu dirumuskan visi yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan dan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan Nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, maka visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun ke depan adalah :

***Menjadikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sebagai Lembaga yang Terpercaya dalam
rangka Mewujudkan kesejahteraan sosial Krama
Karangasem, kesetaraan dan keadilan Gender dalam
Pembangunan serta mewujudkan Pengendalian Penduduk
yang Optimal***

Misi merupakan penjabaran dari Visi. Misi berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada, apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Sejalan dengan visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, maka diperlukan rumusan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai, dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya.

Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.

Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan kesejahteraan sosial Krama Karangasem
2. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
3. Mewujudkan Pengendalian penduduk yang optimal

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan untuk "*Menjadikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Lembaga yang Terpercaya dalam rangka* **Menjadikan Dinas Sosial,**

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Lembaga yang Terpercaya dalam rangka "Mewujudkan kesejahteraan sosial Krama Karangasem dan kesetaraan dan keadilan Gender dalam Pembangunan serta mewujudkan Pengendalian Penduduk yang Optimal" dapat dijabarkan dalam Tabel keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem dapat dilihat lebih jelas dalam Tabel II.1 berikut ini.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tabel II.1

Tujuan Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem **2023**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1. Mewujudkan kesejahteraan sosial Krama Karangasem;	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial	1. Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial	100
2. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;	3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	2. Indeks Pemberdayaan Gender	70,1
3. Mewujudkan Pengendalian penduduk yang optimal	3. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan KB Yang Merata	3. Persentase Peserta KB Aktif (PA)	83 %

Tabel II.2

**Indikator Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Karangasem**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke	
		2022	2023
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial	Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial	100	100
2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	70	70,1
3. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan KB Yang Merata	Persentase Peserta KB Aktif (PA)	82	83

2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023

Tabel II.3

**Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Karangasem Tahun 2023**

No	IKU	Formulasi
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial	Indeks kepuasan dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai-nilai jawaban dari setiap responden pada setiap pertanyaan dalam kuesioner, kemudian dibagi dengan jumlah responden dan dikalikan dengan 100%.
2.	Indeks Pemberdayaan Gender	$1/3 \times (\text{Indeks keterwakilan di parlemen} + \text{Indeks pengambilan keputusan} + \text{Indeks distribusi pendapatan})$
3.	Persentase Peserta KB Aktif (PA)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100 \%$

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.

IKU Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk

menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Anggaran, Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem 2021-2026.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Tabel II.4

Perjanjian Kinerja (PK)

**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Karangasem Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial	Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial	Poin	100
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	70,1
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan KB Yang Merata	Persentase Peserta KB Aktif (PA)	Persen	83

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian Visi Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem. Akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan satu sama lainnya, dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan penilaian kinerja akan diukur melalui penerapan sistem tersebut. Sehingga hal ini dapat menggambarkan suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem telah menyusun Evaluasi Kinerja berbasis laporan pelaksanaan anggaran yang dicapai dan diakumulasi terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dalam upaya mewujudkan visi misi kabupaten agar tercapai realisasi pelaksanaannya pada tahun anggaran 2023.

Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Dalam evaluasi diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Adapun pengukuran kinerja Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dapat dilihat dalam table 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1

**Pengukuran Kinerja Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Karangasem Tahun 2023**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial	Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial	Poin	100	100	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	70,1	64,95	92.65%
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan KB Yang Merata	Persentase Peserta KB Aktif (PA)	Persen	83	64%	77.10%

Dari table di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 telah memenuhi target yang diharapkan.

1. SASARAN 1

Untuk mendukung pencapaian tujuan pertama dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem yaitu “Mewujudkan kesejahteraan sosial Krama Karangasem”, sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial” dengan indikator sasaran, yaitu : Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial.

1) Capaian Kinerja Tahun 2023

Pencapaian sasaran pertama dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial” dengan indikator sasaran, yaitu : Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial yang didukung oleh 5 (lima) program dengan 7 (tujuh) kegiatan serta 21 (dua puluh satu) sub Kegiatan . Adapun pengukuran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023

No.	Sasaran /Program/Kegiatan	Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial	Indeks Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	100%
1.1.	Program 1: PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Terselenggaranya pemberdayaan sosial	Persen	100	100	100%

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

1.1.1.	Kegiatan 1: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100%
1.1.1.1	Sub Kegiatan 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan : 180 Orang	Orang	180	180	100%
	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota : 8 Orang	Orang	8	8	100%
	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota : 100 Orang	Orang	100	100	100%
	4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota : 126 Lembaga	Lemba ga	126	126	100%
	5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan	Sertifikat	2	2	100 %

	Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota : 2 Sertifikat				
1.2	Program 2: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Terselenggaranya rehabilitasi sosial	Persen	100	100	100%
1.2.1	Kegiatan 1: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persen	100	100	100%
1.2.1.1	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota : 88 Orang	Orang	41	41	100%
	2. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten /Kota : 35 Orang	Orang	35	29	81,25%
	3. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota : 28 Orang	Orang	21	21	100%

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

	4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota : 300 Orang	Orang	300	300	100%
	5. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat : 50 Orang	Orang	10	10	100%
1.2.2	Kegiatan 2: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persen	100	100	100%
1.2.2.1	Sub Kegiatan 1. Pemberian Pelayanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota : 100 Orang	Orang	100	100	100%
	2. Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan : 20 Orang	Orang	20	20	100%
	3. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota : 1000 Orang	Orang	1000	1000	100%

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

1.3	Program 3: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Terselenggaranya perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	100%
1.3.1	Kegiatan 1: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	Persen	100	100	100%
1.3.1.1	Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase terfasilitasinya bantuan PMKS dan Santimas	Persen	100	100	100%
	2. Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Persentase jumlah keluarga miskin yang mengikuti pelatihan ketrampilan dan menerima bantuan modal usaha	Persen	100	100	100%
	3. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersediannya data PBI, JKN,PMKS dan PSKS yang akurat dan Valid	Persen	100	100	100%
1.3.2	Kegiatan 2: Permeliharaan Anak- anak Terlantar	Persentase Permeliharaan Anak- anak Terlantar	Persen	100	100	100%
1.3.2.1	Sub Kegiatan : Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Persentase terpantaunya pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Persen	100	100	100%
1.4	Program 4: PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase penanganan bencana	Persen	100	100	100%
1.4.1	Kegiatan 1: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persen	100	100	100%
1.4.1.1	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Makanan	Persentase Fasilitasi bantuan sosial saat bencana dan pasca bencana	Persen	0	0	0%

1.4.2	Kegiatan 2: Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100%
1.4.2.1	Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase fasilitasi bantuan sosial pasca bencana	Persen	100	100	100%
	2. Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase terlaksananya koordinasi, sosialisasi pembentukan kampung siaga bencana	Persen	100	100	100%
1.5	Program 5: PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM	Persentase pengelolaan taman makam	Persen	100	100	100%
1.5.1	Kegiatan 1: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Persen	100	100	100%
1.5.1.1	Sub Kegiatan : 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah terpeliharanya taman makam Pahlawan	Monumen / Tugu	2	2	100%

2) Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis periode renstra sebelumnya dipergunakan untuk menilai sejauh mana gambaran secara fluktuatif pencapaian kinerja sasaran strategis setiap tahunnya, kemudian dapat dinilai faktor pendukung dan penghambat pencapaian kerjanya.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	2022			2023		
			T	R	C	T	R	C
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial”	Indeks Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100

KETERANGAN :

T : Target

R : Realisasi

C : Capaian

Dari tabel di atas, dapat dilihat gambaran capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial” selama 2 (dua) tahun terakhir selalu memenuhi target yang ditetapkan.

3) Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis dengan target Renstra yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dipergunakan untuk menilai sejauh mana gambaran secara fluktuatif pencapaian kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan target renstra yang ditetapkan, kemudian dapat dinilai faktor pendukung dan penghambat pencapaian kerjanya.

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Renstra OPP 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d 2023	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial”	Indeks Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100	100	100%

Dari tabel di atas, dapat digambarkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2023 bukan merupakan capaian kinerja yang bersifat kumulatif sehingga capaian kinerja sasaran strategisnya menggambarkan kondisi kinerja harus diukur setiap tahun. Realisasi capaian kinerja yang disampaikan pada tabel tersebut adalah capaian kinerja sasaran strategis yang dapat diwujudkan pada tahun 2023.

4) Capaian Kinerja Target SPM/Standar Nasional

Capaian kinerja sasaran strategis pertama pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023, tidak ada yang menjadi capaian kinerja target SPM/Standar Nasional sehingga tidak perlu membandingkan capaian kinerja sasaran strategisnya dengan capaian kinerja target SPM/Standar Nasional.

5) Analisa Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi digunakan untuk mengetahui seberapa efisien anggaran yang dipergunakan dalam mencapai kinerja sasaran. Semakin sedikit input yang dikeluarkan untuk mencapai output, maka tingkat efisiensi semakin tinggi, dan sebaliknya semakin banyak input yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja sasaran, maka tingkat efisiensi semakin rendah

Tabel 3.5

Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Kinerja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	89	0,90	100	100	1	0.01

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

2	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	100	58	0,60	100	100	4	0,04
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	88	0,90	100	100	1	0,02
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	4,32	0,4	100	100	0,6	0,06
5	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	71	0,71	100	100	3	0,03
6	Penyediaan Alat Bantu	100	80	0,80	100	100	2	0,02
7	Penyediaan Permakanan	100	0,81	0,81	100	100	2	0,02
8	Penyediaan Sandang	100	0,93	0,93	100	100	1	0,01
9	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100	99	0,99	100	100	1	0,01
10	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	100	80	0,80	100	100	2	0,02
11	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100	99	0,99	100	100	1	0,01
12	Pemberian Pelayanan Kedaruratan	100	75	0,75	100	100	3	0,03
13	Pemberian Layanan Rujukan	100	98	0,98	100	100	1	0,01
14	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	100	56	0,56	100	100	4	0,04

15	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
16	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	62	0,62	100	100	4	0,04
17	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	100	93	0,93	100	100	1	0,01
18	Penyediaan Makanan	100	85	0,85	100	100	1	0,01
19	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	100	96	0,96	100	100	1	0,01
20	Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	100	96	0,96	100	100	1	0,01
21	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100	85	0,85	100	100	1	0,01

Dari tabel di atas, dapat digambarkan bahwa secara keseluruhan tingkat efisiensi atas kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis bernilai positif yang dibuktikan dengan input yang minimal dapat menjangkau pencapaian output yang ditargetkan pada tahun 2023.

2. SASARAN 2

Untuk mendukung pencapaian tujuan kedua dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem yaitu “Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak” dengan indikator sasaran, yaitu : Indeks Pemberdayaan Gender.

1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pencapaian sasaran kedua dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak” dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender yang didukung oleh 5 (lima) program dengan

empat kegiatan serta 11 (sebelas) Sub Kegiatan. Adapun pengukuran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dapat dilihat dibawah ini.

**Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023**

No.	Sasaran /Program/Kegiatan	Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	POIN	70,1	64.95	92.65%
1.1.	Program 1 : PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persen	40	40	100%
1.1.1	Kegiatan 1 : 1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Persen	40%	40%	100%
1.1.1.1	Sub Kegiatan : 1. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat daerah dan desa yang mampu memahami kesetaraan dan keadilan gender	PD	20	20	100%
1.1.2	Kegiatan 2 : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Persen	40	40	100%
1.1.2.1	Sub Kegiatan : 1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang diberikan sosialisai Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Orang	160	160	100%
1.2	Program 2 : PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan	Persen	100	54	54%

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

1.2.1	Kegiatan 1: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Persen	100	57	57%
1.2.1.1	Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perlindungan Perempuan yang terfasilitasi	Persen	100	57	57%
1.2.2	Kegiatan 2: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Persen	100	50	50%
1.2.2.1	Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban perempuan yang terlayani	Persen	100	50	50%
1.3	Program 3 : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase peningkatan kualitas keluarga	Persen	100	100	100%
1.3.1	Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Persen	100	100	100%
1.3.1.1	Sub Kegiatan : 1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Keluarga atau kelompok P2WKSS yang paham dalam membangun kualitas keluarga	Orang	35	35	100%
1.3.2	Kegiatan 2: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan	Persen	100	100	100%

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

	Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten /Kota	KG dan Hak Anak				
1.3. 2.1	Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang terfasilitasi sosialisasi peningkatan kualitas keluarga	Lembaga Masyarakat	5	5	100%
1.4	Program 4 : PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persen	60	60	100%
1.4. 1	Kegiatan 1: Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Persen	60	60	100%
1.4. 1.1	Sub Kegiatan : 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah FAD dan FA Desa yang terbentuk	FAD dan FA Desa	1	1	100%
1.4. 2	Kegiatan 2: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persen	60	60	100%
1.4. 2.1	Sub Kegiatan : 1. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah atau Masyarakat atau Dunia Usaha atau Media Massa yang berpartisipasi	LM	5	5	100%
1.5	Program 5 : PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Khusus Anak	Persen	100	73	73%
1.5. 1	Kegiatan 1: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Persen	100	70	70%
1.5. 1.1	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Layanan	Persentase kasus tindak kekerasan terhadap anak yang	Persen	100	89	89%

	Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tertangani				
	2. Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terfasilitasi	Persen	100	49	49%
1.5. 2	Kegiatan 2: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persen	100	75	75%
1.5. 2.1	Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang mendapatkan Pelatihan	Persen	100	75	75%

2. Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis periode renstra sebelumnya dipergunakan untuk menilai sejauh mana gambaran secara fluktuatif pencapaian kinerja sasaran strategis setiap tahunnya, kemudian dapat dinilai faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerjanya

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2023		
			T	R	C	T	R	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	61,98	63,91	103%	70.1	64.95	92,65

KETERANGAN :

T : Target
R : Realisasi
C : Capaian

Dari tabel di atas, dapat dilihat gambaran capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak” selama 2 (dua) tahun terakhir selalu memenuhi target yang ditetapkan.

3. Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis dengan target Renstra yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dipergunakan untuk menilai sejauh mana gambaran secara fluktuatif pencapaian kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan target renstra yang ditetapkan, kemudian dapat dinilai faktor pendukung dan penghambat pencapaian kerjanya.

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Renstra OPP 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d 2023	Capaian
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	70,1	64,95	92,65%

Dari tabel di atas, dapat digambarkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2023 bukan merupakan capaian kinerja yang bersifat kumulatif sehingga capaian kinerja sasaran strategisnya menggambarkan kondisi kinerja harus diukur setiap tahun. Realisasi capaian kinerja yang disampaikan pada tabel tersebut adalah capaian kinerja sasaran strategis yang dapat diwujudkan pada tahun 2023.

4. Capaian Kinerja Target SPM/Standar Nasional

Capaian kinerja sasaran strategis pertama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem Tahun 2023, tidak ada yang menjadi capaian kinerja target

SPM/Standar Nasional sehingga tidak perlu membandingkan capaian kinerja sasaran strategisnya dengan capaian kinerja target SPM/Standar Nasional.

5. Analisa Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi digunakan untuk mengetahui seberapa efisien anggaran yang dipergunakan dalam mencapai kinerja sasaran. Semakin sedikit input yang dikeluarkan untuk mencapai output, maka tingkat efisiensi semakin tinggi, dan sebaliknya semakin banyak input yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja sasaran, maka tingkat efisiensi semakin rendah.

Tabel 3.9

**Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023**

No	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	100	91	0.91	100	100	1	0,01
2	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100	89	0,89	100	100	1	0.01
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	57	0,57	100	100	43	0,043
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	50	0.50	100	100	5	0.05

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

5	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	70	0.70	100	100	3	0.03
6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	83	0.83	100	100	2	0.02
7	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100	67	0.67	100	100	4	0.04
8	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	84	0.84	100	100	2	0.02
9	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	89	0.89	100	100	1	0.01
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100	49	0.49	100	100	6	0.06
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	76	0.76	100	100	3	0.03

Dari table diatas, dapat digambarkan bahwa secara keseluruhan tingkat efisiensi ata kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis bernilai positif yang dibuktikan dengan input yang minimal dapat menjangkau pencapaian output yang ditargetkan pada tahun 2023.

3. SASARAN 3

Untuk mendukung pencapain tujuan ketiga dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem yaitu “Mewujudkan Pengendalian penduduk yang optimal” sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan KB Yang Merata” dengan indikator sasaran, yaitu : Persentase Peserta KB Aktif (PA)

1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pencapaian sasaran ketiga dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem adalah “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan KB Yang Merata” dengan indikator sasaran, yaitu : Persentase Peserta KB Aktif (PA yang didukung oleh 3 (tiga) program dengan empat kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan . Adapun pengukuran kinerja Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dapat dilihat dibawah.

Tabel 3.10

Pengukuran Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

No.	Sasaran /Program/Kegiatan	Indikator Sasaran /Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Sasaran: Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan KB Yang Merata	Persentase Peserta KB Aktif (PA)	Persen	83	64	77,10 %

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

1.1	Program 1 : PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pengendalian penduduk	Persen	54	54	100%
1.1.1	Kegiatan 1 : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Persen	54	54	100%
1.1.1.1	Sub Kegiatan : 1.Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Tahun	1	1	100%
	2.Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Terlaksananya kegiatan cetak data keluarga	Rumah Tangga	1006	1006	100%
	3.Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya pengolahan dan pelaporan data surveillance stunting	Tahun	1	1	100%
1.2	Program 2 : PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan keluarga berencana (kb)	Persen	92	92	100%
1.2.1	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persen	100	100	100%
1.2.1.1	Sub Kegiatan : 1.Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya advokasi program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja	Kali	1	1	100%
	2.Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya promosi dan KIE Program KKBPK melalui media cetak dan Elektronik serta media luar ruang	Kali	16	16	100 %
	3. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Terlaksananya pencitraan program KKBPK melalui media massa cetak, Elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal	Tahun	1	1	100%
	4. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya rapat koordinasi mekanisme Operasional	Tahun	1	1	100%
	5. Pengendalian	Terlaksananya Audit	Kalua	1	1	100%

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

	6. Program KKBPBPK	Stunting				
	7. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPBPK	Terlaksananya operasional penyuluhan KB	Balai Penyuluh	8	8	100%
1.2.2	Kegiatan 2 : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persen	65	65	100%
1.2.2.1	Sub Kegiatan : 1. Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya KIE oleh kader	Desa	78	78	100%
1.2.3	Kegiatan 3 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Persen	92	92	100%
1.2.3.1	Sub Kegiatan : 1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya operasional distribusi Alkon	Faskes	25	25	100%
	2. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Terlaksananya penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	Kasus	8	8	100%
	3. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya pengadaan sarana penunjang pelayanan KB	Paket	3	3	100%
	4. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Terlaksananya pembinaan pasca pelayanan peserta KB	Tahun	1	1	100%
	5. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya pembinaan KB pasca Reproduksi	Faskes	25	25	100%
	6. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Operasional penggerakkan pelayanan Implant, IUD, MOP, MOW - Terlaksananya Operasional penggerakkan pelayanan pencabutan Implant	Akseptor	3997	1294	32.37 %
	7. Dukungan Operasional	Terlaksananya Operasional KB	Kali	16	16	100%

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

	Pelayanan KB Bergerak	bergerak				
	8. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksananya promosi dan konseling kespro serta hak-hak reproduksi di faskes	-	-	-	-
1.2.4	Kegiatan 3 : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persen	87	87	100%
1.2.4.1	Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Kampung KB	11	11	100%
1.3	Program 3 : PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Persen	98	98	100%
1.3.1	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	98	98	100%
1.3.1.1	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya kegiatan pembinaan Poktan Tribina, PIK-R P3KS dan UPPKS	Kecamatan	8	8	100%
	2. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya kegiatan penurunan Stunting	Kecamatan	8	8	100%

2. Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis periode renstra sebelumnya dipergunakan untuk menilai sejauh mana gambaran secara fluktuatif pencapaian kinerja sasaran strategis setiap tahunnya, kemudian dapat dinilai faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerjanya

**Tabel 3.11
Capaian Kinerja Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2023		
			T	R	T	R	C	T
1	2	3	4	5	6	7	8	19
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan KB Yang Merata	Persentase Peserta KB Aktif (PA)	81	81	100	83	64	77.10

KETERANGAN :

T : Target

R : Realisasi

C : Capaian

Dari tabel di atas, dapat dilihat gambaran capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan KB Yang Merata” selama 2 (dua) tahun terakhir selalu memenuhi target yang ditetapkan.

3. Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis dengan target Renstra yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dipergunakan untuk menilai sejauh mana gambaran secara fluktuatif pencapaian kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan target renstra yang ditetapkan, kemudian dapat dinilai faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerjanya.

**Tabel 3.12
Capaian Kinerja Renstra OPP 2021-2026**

	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d 2023	Capaian
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan KB Yang Merata	Persentase Peserta KB Aktif (PA)	83	64	77,10%

Dari tabel di atas, dapat digambarkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2023 bukan merupakan capaian kinerja yang bersifat kumulatif sehingga capaian kinerja sasaran strategisnya menggambarkan kondisi kinerja harus diukur setiap tahun. Realisasi capaian kinerja yang disampaikan pada tabel tersebut adalah capaian kinerja sasaran strategis yang dapat diwujudkan pada tahun 2023.

4. Capaian Kinerja Target SPM/Standar Nasional

Capaian kinerja sasaran strategis pertama pada Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem Tahun 2023, tidak ada yang menjadi capaian kinerja target SPM/Standar Nasional sehingga tidak perlu membandingkan capaian kinerja sasaran strategisnya dengan capaian kinerja target SPM/Standar Nasional.

5. Analisa Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi digunakan untuk mengetahui seberapa efisien anggaran yang dipergunakan dalam mencapai kinerja sasaran. Semakin sedikit input yang dikeluarkan untuk mencapai output, maka tingkat efisiensi semakin tinggi, dan sebaliknya semakin banyak input yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja sasaran, maka tingkat efisiensi semakin rendah.

Tabel 3.13
**Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Karangasem Tahun 2023**

No	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100	56	0,56	100	100	4	0,04
2	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	100	99	0,99	100	100	1	0,01
3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100	86	0.86	100	100	2	0.02
4	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100	99	0.99	100	100	1	0.01
5	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100	90	0.90	100	100	1	0.01
6	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	100	98	0.98	100	100	1	0.01
7	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100	40	0.40	100	100	6	0.06
8	Pengendalian Program KKBPK	100	81	0.81	100	100	2	0.02
9	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	100	94	0.94	100	100	1	0.01
10	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100	100	0	100	100	0	0

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

11	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100	100	0	100	100	0	0
12	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100	81	0.81	100	100	2	0.02
13	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100	99	0.99	100	100	1	0.01
14	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100	25	0.25	100	100	2	0.02
15	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100	80	0.80	100	100	2	0.02
16	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	100	48	0.48	100	100	4	0.04
17	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	100	100	0	100	100	0	0
18	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	100	95	0.95	100	100	1	0.01

	Keluarga/UPPKS)							
19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100	56	0.56	100	100	4	0.04

Dari table diatas, dapat digambarkan bahwa secara keseluruhan tingkat efisiensi ata kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis bernilai positif yang dibuktikan dengan input yang minimal dapat menjangkau pencapaian output yang ditargetkan pada tahun 2023.

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem pada Tahun 2023 memperoleh anggaran induk sebesar Rp. 13.773.974.010,00 terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp. 3.672.433.289,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.712.130.721,00, Belanja Hibah sebesar Rp. 280.000.000,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 75.000.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 201.910.000,00 setelah mengalami perubahan Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memperoleh anggaran sebesar Rp. 15.598.607.658,00 terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp.4.958.563.887,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 10.160.013.771,00, Belanja Hibah sebesar Rp. 207.410.000,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 224.400.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 197.620.000,00

Adapun gambaran kegiatan serta besaran anggaran dan realisasinya dapat dilihat lebih jelas di bawah ini.

**Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi**

N O	PROGRAM / KEGIATAN	DPPA (PERUBAHAN)	REALISASI (Rp)	SISA DANA	%Capaian	Kinerja	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.267.200,00	35.795.300,00	471.900,00	98,7	98,7	Terlaksana
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.787.806.255,00	4.027.353.518,00	1.760.452.737,00	69,58	100	Terlaksana
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	79.862.400,00	77.750.200,00	2.112.200,00	97,36	97,36	Terlaksana
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	230.990.800,00	183.410.250,00	47.580.550,00	79,4	86,48	Terlaksana
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.184.800,00	16.347.400,00	3.837.400,00	80,99	98,8	Terlaksana
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.709.600,00	6.944.900,00	764.700,00	90,08	93,33	Terlaksana
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.932.300,00	14.734.600,00	197.700,00	98,68	98,68	Terlaksana
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.229.080,00	9.986.450,00	3.242.630,00	75,49	75,49	Terlaksana
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.956.000,00	5.325.000,00	4.631.000,00	53,49	76,39	Terlaksana
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.000.000,00	8.589.140,00	101.410.860,00	7,81	7,81	Terlaksana
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.150.700,00	88.900.000,00	16.250.700,00	84,55	100	Terlaksana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.304.840,00	51.440.600,00	1.864.240,00	96,5	96,5	Terlaksana
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	134.624.800,00	134.514.400,00	110.400,00	99,92	100	Terlaksana
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.590.000,00	80.134.726,00	55.455.274,00	59,1	59,1	Terlaksana
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	208.126.174,00	206.975.600,00	1.150.574,00	99,45	99,45	Terlaksana
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	509.402.875,00	455.088.350,00	54.314.525,00	89,34	89,34	Terlaksana

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.491.854,00	51.345.000,00	23.146.854,00	68,93	68.93	Terlaksana
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.033.575,00	78.046.950,00	5.986.625,00	92,88	92.88	Terlaksana
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.237.100,00	21.552.000,00	1.685.100,00	92,75	92.75	Terlaksana
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.598.800,00	20.927.600,00	4.671.200,00	81,75	81.75	Terlaksana
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							
1	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	161.064.350,00	131.749.050,00	29.315.300,00	81,8	88.85	Terlaksana
2	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	89.798.700,00	52.525.800,00	37.272.900,00	58,49	58.49	Terlaksana
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	51.904.500,00	41.200.350,00	10.704.150,00	79,38	88.03	Terlaksana
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83.394.400,00	3.600.000,00	79.794.400,00	4,32	4.32	Terlaksana
5	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	377.398.050,00	71.207.400,00	306.190.650,00	18,87	70.83	Terlaksana
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
1	Penyediaan Alat Bantu	87.750.000,00	55.422.500,00	32.327.500,00	63,16	80	Terlaksana
2	Penyediaan Permakanaan	234.050.650,00	189.789.650,00	44.261.000,00	81,09	81.09	Terlaksana

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

3	Penyediaan Sandang	61.200.000,00	50.760.200,00	10.439.800,00	82,94	92.86	Terlaksana
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	28.833.100,00	16.079.300,00	12.753.800,00	55,77	99	Terlaksana
5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	75.121.350,00	40.938.300,00	34.183.050,00	54,5	80.05	Terlaksana
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							
6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	74.018.800,00	65.177.250,00	8.841.550,00	88,05	99	Terlaksana
7	Pemberian Pelayanan Kedaruratan	59.538.100,00	11.775.000,00	47.763.100,00	19,78	75	Terlaksana
8	Pemberian Layanan Rujukan	45.388.000,00	32.208.400,00	13.179.600,00	70,96	98	Terlaksana
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	195.850.000,00	110.378.700,00	85.471.300,00	56,36	56.36	Terlaksana
2	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	54.474.400,00	0	54.474.400,00	0	0	
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	158.603.600,00	97.903.950,00	60.699.650,00	61,73	61.73	Terlaksana
4	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	50.000.000,00	28.139.150,00	21.860.850,00	56,28	92.95	Terlaksana
PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							
1	Penyediaan Makanan	104.500.000,00	68.042.900,00	36.457.100,00	65,11	85	Terlaksana
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	63.000.000,00	24.563.300,00	38.436.700,00	38,99	95.55	Terlaksana
3	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	25.000.000,00	23.279.300,00	1.720.700,00	93,12	95.55	Terlaksana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100.000.000,00	86.034.845,00	13.965.155,00	86,03	85.11	Terlaksana
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan							

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	40.972.750,00	37.113.900,00	3.858.850,00	90,58	90.58	Terlaksana
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	37.886.700,00	33.530.430,00	4.356.270,00	88,5	88.5	Terlaksana
Program Perlindungan Perempuan							
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	167.831.100,00	95.405.800,00	72.425.300,00	56,85	56.92	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	116.004.952,00	10.200.000,00	105.804.952,00	8,8	50.35	Terlaksana
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.666.700,00	6.777.500,00	2.889.200,00	70,11	70.11	Terlaksana
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten /Kota							

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.619.000,00	4.691.000,00	928.000,00	83,48	83.48	Terlaksana
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)							
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	47.969.600,00	32.368.950,00	15.600.650,00	67,48	67.48	Terlaksana
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.575.200,00	31.566.950,00	6.008.250,00	84,01	84.18	Terlaksana
Program Perlindungan Khusus Anak							
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.443.800,00	51.703.800,00	6.740.000,00	88,47	88.47	Terlaksana
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	146.039.048,00	10.750.000	135.289.048,00	7,36	48.97	Terlaksana
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	76.806.000,00	52.461.550,00	24.344.450,00	68,3	75.85	Terlaksana

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

	Daerah Kabupaten/Kota						
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	65.998.000,00	37.213.200,00	28.784.800,00	56,39	56,39	Terlaksana
2	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	5.030.000,00	5.029.500,00	500,00	99,99	100	Terlaksana
3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	98.400.300,00	84.620.000,00	13.780.300,00	86	86	Terlaksana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal							
1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000,00	4.325.000,00	50.000,00	98,86	100	Terlaksana
2	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	423.967.200,00	383.446.400,00	40.520.800,00	90,44	90,44	Terlaksana
3	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	25.000.000,00	24.654.000,00	346.000,00	98,62	100	Terlaksana
4	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	124.800.000,00	50.160.000,00	74.640.000,00	40,19	40,19	Terlaksana
5	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,00	32.544.000,00	7.456.000,00	81,36	81,36	Terlaksana
6	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	324.000.000,00	304.715.900,00	19.284.100,00	94,05	94,05	Terlaksana
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							
7	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	374.400.000,00	374.400.000,00	0,00	100	100	Terlaksana
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

8	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100	100	Terlaksana
9	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	0	0	0	0	0	-
10	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	741.000.000,00	601.513.500,00	139.486.500,00	81,18	81.18	Terlaksana
11	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	-
12	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10.800.000,00	10.680.000,00	120.000,00	98,89	98.89	Terlaksana
13	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.122.705.700,00	286.917.813,00	835.787.887,00	25,56	25.56	Terlaksana
14	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	60.000.000,00	45.791.169,00	14.208.831,00	76,32	79.41	Terlaksana
15	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	43.000.000,00	20.689.100,00	22.310.900,00	48,11	48.11	Terlaksana
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							
16	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	189.750.000,00	189.750.000,00	0,00	100	100	Terlaksana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

1	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	72.115.600,00	57.782.300,00	14.333.300,00	80,12	95	Terlaksana
2	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.086.460.000,00	1.169.300.000,00	917.160.000,00	56,04	56.04	Terlaksana

3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2023

Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2021 menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Madya yang sebelumnya pada



Evaluasi KLA Tahun 2019 memperoleh predikat dengan Kategori Pratama. Penghargaan tersebut diperoleh merupakan buah hasil Evaluasi KLA dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 terhadap kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya pemenuhan hak dan

perlindungan khusus anak di Kabupaten Karangasem.

Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2021 dilaksanakan terhadap 24 Indikator yang terbagi kedalam 5 Klaster yaitu Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan Klaster V Perlindungan Khusus ditambah Indikator Kelembagaan, Indikator Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan Indikator COVID-19.

Beda dari tahun sebelumnya, penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dilaksanakan secara daring (online) dan dihadiri langsung oleh Bupati Karangasem, I Gede Dana, didampingi oleh Bapak Sekda, Kepala DPPPA, dan Kepala Bappelitbangda di Ruang Karangasem Monitoring Center (KMC), Kamis (29/7/2021).

Usaha ini juga tidak lepas dari Komitmen Pemerintah Daerah, OPD pengampu Pemenuhan Hak Anak di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa

serta semua pihak yg ikut terlibat seperti Fom Anak Daerah Karangasem, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa.

Semoga dengan penghargaan ini kita lebih bersemangat dalam memenuhi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Karangasem dan kedepannya agar lebih meningkat apalagi di saat Pandemi Covid-19 ini. Oleh karena, "**Semua Anak adalah Anak Kita**".

#karangasemlayakanak

3.4 Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terhadap Capaian PK Bupati

Adapun capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem dibandingkan dengan capaian Perjanjian Kinerja Bupati Karangasem Tahun 2021-2026 dalam Tabel 3.19 di bawah ini.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem terhadap Capaian PK Bupati

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	2022			2023		
			T	R	C	T	R	C
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial	Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	61,98	63,91	98	70.1	64,95	92.62

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan KB Yang Merata	Persentase Peserta KB Aktif (PA)	82	58	70,73	83	64	77.10
---	--	----------------------------------	----	----	-------	----	----	-------

KETERANGAN :

T : Target

R : Realisasi

C : Capaian

Dari table diatas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem selama 1 (satu) Tahun terakhir selalu memenuhi target yang diharapkan. Hal ini sangat didukung oleh perencanaan anggaran sesuai dengan rencana kerja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem atas penggunaan anggaran. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem telah mengupayakan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan fungsi manajemen kinerja secara taat asas melalui penerapan seluruh elemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

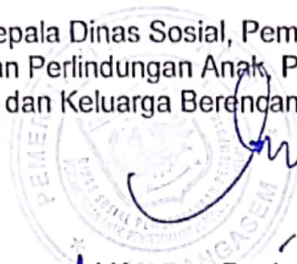
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 ini dibuat dan semoga dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja instansi di masa-masa datang.

Amlapura, 5 Pebruari 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kab. Karangasem

DP



I Komang Daging, S.Sos, M.Si
NIP. 19651023 198602 1 002